#### **SKRIPSI**

# UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DAFTAR G YANG TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN DI KOTA PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM** 

**UNIVERSITAS ANDALAS** 

**PADANG** 

2018

NO.REG: 5262/PKIV/IV/2018

# a 2 b d

# No. Alumni Universitas:

## Nama Mahasiswa: SALSALINA ITHA

No. Alumni Fakultas:

a)Tempat/Tanggal Lahir: Payakumbuh 13 Desember 1996 f)Tanggal Lulus :18 Oktober 2018

b)Nama Orang Tua: Ir. Muliadi Karo Karo,M.P.g)Predikat Lulus :Sangat Memuaskan dan Dra. Suasana Br.Tarigan h) Lama Studi :4 Tahun 2Bulan

c)Fakultas : Hukum i)IPK: 3,57

d)Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.BP : 1410111068 j) Alamat :JI Utama No.88 Purwajaya, Tanjung Pati, Kab. Limapuluh Kota

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DAFTAR G YANG TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN DI KOTA PADANG

(Salsalina Itha Karina, 1410111068, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2018)

### **ABSTRAK**

Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional, akan tetapi tidak jarang pula dilakukannya berbagai macam tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, terutama masyarakat yang menjadi konsumen dari obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Padang (Polrestabes Padang) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang terhadap pelaku peredaran obat keras daftar G yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Kota Padang. (2) Kendala dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Padang (Polrestabes Padang) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang terhadap pelaku peredaran obat keras daftar G yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Kota Padang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Padang (Polrestabes Padang) dan Balai Besar POM di Padang, dapat disimpulkan bahwa (1) penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Padang didasarkan pada pendataan di toko-toko obat dan apotek yang ada di wilayah kota Padang. Berdasarkan data data tersebut, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan ke tokotoko obat dan apotek. Apabila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana, maka akan dilakukan penyidikan. Balai Besar POM di Padang melakukan penyidikan berdasarkan pemeriksaan rutin ke sarana-sarana kefarmasian, investigasi, dan laporan masyarakat. (2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Padang adalah minimnya personel kepolisian yang memiliki kompetensi di bidang obat-obatan daftar G, sedangkan kendala yang dihadapi oleh penyidik Balai Besar POM di Padang adalah kesulitan untuk menghadirkan saksi dari pihak pelaku tindak pidana, dan jangka waktu yang terlalu singkat untuk pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor sehingga adakalanya sulit untuk dipenuhi. Kata Kunci: Obat Keras, Tindak Pidana Kefarmasian, Praktik Kefarmasian, Tindak Pidana Kesehatan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Oktober 2018. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,		
TandaTangan	Panguii	Penguji II
		Cinguji II
The state of the s		
NamaTerang	Dr. H. A.Irzal Rias, S.H., M.H.	Dr. Nani Mulyati, S.H.,MCL
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Divitalii Wulyati, S.11.,WICL
		10/

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: Dr. A H. Irzal Iryas, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	' r_	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: